

## BAB 11

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1 Laporan Keuangan

Salah satu pilar utama tegaknya perekonomian suatu negara adalah adanya akuntabilitas dari para pemangku kekuasaan. Istilah lain dari akuntabilitas adalah “amanah” yang berarti pemangku kekuasaan yang akuntabel atau amanah adalah mereka yang terpercaya dan bertanggungjawab dalam mengelola sumber daya publik dipercayakan kepadanya.

Terkait dengan tugas untuk menegakkan akuntabilitas keuangan, khususnya di daerah, pemerintah daerah bertanggungjawab untuk mempublikasikan laporan keuangan. Terdapat dua alasan utama mengapa pemerintah daerah perlu mempublikasikan laporan keuangan, yaitu (Mahmudi,2015) :

1. Dari sisi internal, laporan keuangan merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja bagi pemerintah daerah secara keseluruhan maupun unit-unit kerja didalamnya. Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban internal (*internal acjumlahability*), yaitu pertanggungjawaban satuan kerja kepada kepala daerah.

2. Dari sisi pemakai eksternal, laporan keuangan pemerintah daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban eksternal (*eksternal acjumulability*), yaitu pertanggungjawaban kepala daerah kepada masyarakat, investor, kreditor, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan pihak-pihak laporan tersebut sebagai dasar untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik.

### **2.1.2 Pentingnya Laporan Keuangan Daerah**

Laporan keuangan merupakan bentuk dari pertanggungjawaban pengelola keuangan negara/daerah selama satu periode. Laporan keuangan tersebut disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan (Haryanto, dkk,2014).

#### **2.1.2.1 Tujuan Pelaporan Keuangan**

Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan dalam peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 2004 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa pelaporan keangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun, politik dengan (Mardiasmo,2016) :

1. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
2. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan hasil-hasil yang telah dicapai.
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana, dan arus kas suatu entitas pelaporan (Mardiasmo,2016).

#### 2.1.2.2. Komponen laporan keuangan

Laporan keuangan untuk lingkup pemerintah daerah meliputi laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah dan laporan konsolidasi dari seluruh laporan keuangan SKPD yang disusun dalam bentuk laporan keuangan pemerintah daerah (Mahmudi, 2015). Laporan keuangan pokok terdiri dari (peraturan pemerintah Nomor 71 tahun 2010) :

1. Laporan realisasi anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan.

2. Laporan posisi keuangan

Laporan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas, dana pada tanggal tertentu.

3. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktifitas operasional, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan transaksi non anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu.

#### 4. Catatan atas Laporan Keuangan (CALK)

Catatan Atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan Atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan didalam Standar Akuntansi pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

##### **2.1.3. Pemahaman Laporan Keuangan**

Mahmudi (2015) mengemukakan bahwa sebagian besar pemangku kepentingan pemerintah bukanlah orang yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi sedangkan para pemangku kepentingan tersebut memiliki kepentingan yang sangat tinggi terhadap laporan keuangan tersebut. Selanjutnya Mahmudi (2015) menyatakan bahwa untuk dapat memahami laporan keuangan secara lebih komprehensif perlu memperhatikan beberapa aspek berikut :

1. Pemahaman unsur dari laporan keuangan
2. Proses pelaporan
3. Logika akuntansi

Dengan demikian, memahami laporan keuangan secara keseluruhan berarti memahami ketiga aspek tersebut secara mendalam untuk keseluruhan isi dari laporan keuangan itu sendiri. Menurut Mahmudi (2015) memahami secara menyeluruh isi dari laporan keuangan berarti memahami ketiga aspek dari setiap isi pokok dari laporan keuangan yang terdiri atas 4 pokok. Seseorang dengan pemahaman yang baik tentang laporan keuangan akan dapat menjelaskan seluruh aspek dari seluruh unsur pokok laporan keuangan yang artinya untuk setiap isi pokok (yaitu LRA, neraca, laporan arus kas dan CALK) akan dapat dijelaskan secara menyeluruh ketiga aspeknya (yaitu unsur dari setiap pokok, proses pelaporannya dan logika akuntansinya).

#### **2.1.4. Tingkat Pendidikan**

Pengertian pendidikan adalah tugas untuk meningkatkan pengetahuan, pengertian atau sikap tenaga kerja sehingga mereka dapat lebih baik menyesuaikan dengan lingkungan kerja mereka. Pendidikan ditinjau dari segi konseptual adalah semua proses yang mengarah ke tingkat hidup yang lebih baik, dan berlangsung sejak manusia lahir sampai manusia masuk ke liang kubur, dan diselenggarakan disekolah maupun diluar sekolah yang tidak lepas dari ikatan tempat, waktu dan terbatas pada masa pengajaran tertentu. Flippo (1990), mengartikan pendidikan sebagai usaha meningkatkan pengetahuan pengertian dalam hal seluruh lingkungan secara umum. Menurut Philip H. Combs(1995), pada dasarnya pendidikan dibagi menjadi tiga, yaitu :

1. Pendidikan formal, yaitu pendidikan yang bisa dikenal dengan pendidikan sekolah yang teratur, bertingkat dan mengikuti syarat-syarat yang jelas dan sehat. Istilah pendidikan formal disini dipakai untuk menyebut “sistem pendidikan” yang sangat dilembagakan, bertahap kronologis dan bertata-tingkat, mulai dari sekolah dasar sampai pada tingkat tertinggi pendidikan universitas.
2. Pendidikan informal, yaitu pendidikan yang diperoleh seorang dari pengalaman sehari-hari dengan sadar atau tidak sadar yang berlangsung sejak lahir sampai mati didalam pergaulan sehari-hari. Pada umumnya pendidikan informal ini tidak berorganisasi dan sering kali kurang sistematis pula, namun ia merupakan sumber terbesar dari segala apa yang dipelajari setiap orang seumur hidupnya.
3. Pendidikan non formal, yaitu pendidikan yang diperoleh secara teratur dan sadar dilakukan, tetapi tidak perlu mengikuti peraturan-peraturan ketat dan tetap, biasanya berbentuk kursus-kursus.

Proses pendidikan bertujuan agar dapat menghasilkan perubahan yang tidak hanya berkaitan dengan jumlah pengetahuan saja, tetapi juga dalam bentuk kecakapan, kebiasaan sikap, pengertian, penghargaan, minat, menyesuaikan diri dan lainnya yang berkenaan dengan aspek pribadi seseorang sehingga akan nampak pada kinerjanya.

#### **2.1.5. Pelatihan**

Pada hakekatnya kegiatan pelatihan atau *training* perlu dilaksanakan oleh suatu perusahaan atau organisasi dengan tujuan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan. Banyak ahli berpendapat tentang arti, tujuan dan manfaat pelatihan. Namun dari berbagai pendapat tersebut pada prinsipnya tidak jauh berbeda. Aisyah (2016) mengartikan pelatihan sebagai “proses pendidikan jangka pendek yang menggunakan cara dan prosedur yang sistematis dan terorganisir. Para peserta pelatihan akan mempelajari pengetahuan dan keterampilan yang sifatnya praktis untuk tujuan tertentu”. Pelatihan adalah suatu proses membantu orang lain dalam memperoleh skill dan pengetahuan (Ningtyas, 2017). Sedangkan Michael J. Jucius menjelaskan istilah latihan untuk menunjukkan setiap proses untuk mengembangkan bakat, keterampilan, dan kemampuan pegawai guna menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan tertentu.

Pelatihan mengandung makna yang lebih khusus (spesifik), dan berhubungan dengan pekerjaan/tugas yang dilakukan seseorang. Sedangkan yang dimaksud praktis adalah, bahwa reponden yang sudah dilatihkan dapat diaplikasikan dengan segera sehingga harus bersifat praktis, (Muhammad Hidayatullah, 2015).

Definisi pelatihan menurut *center for Development Management and Produktifity* adalah belajar untuk mengubah tingkah laku orang dalam melaksanakan pekerjaan mereka. Pelatihan pada dasarnya adalah suatu proses

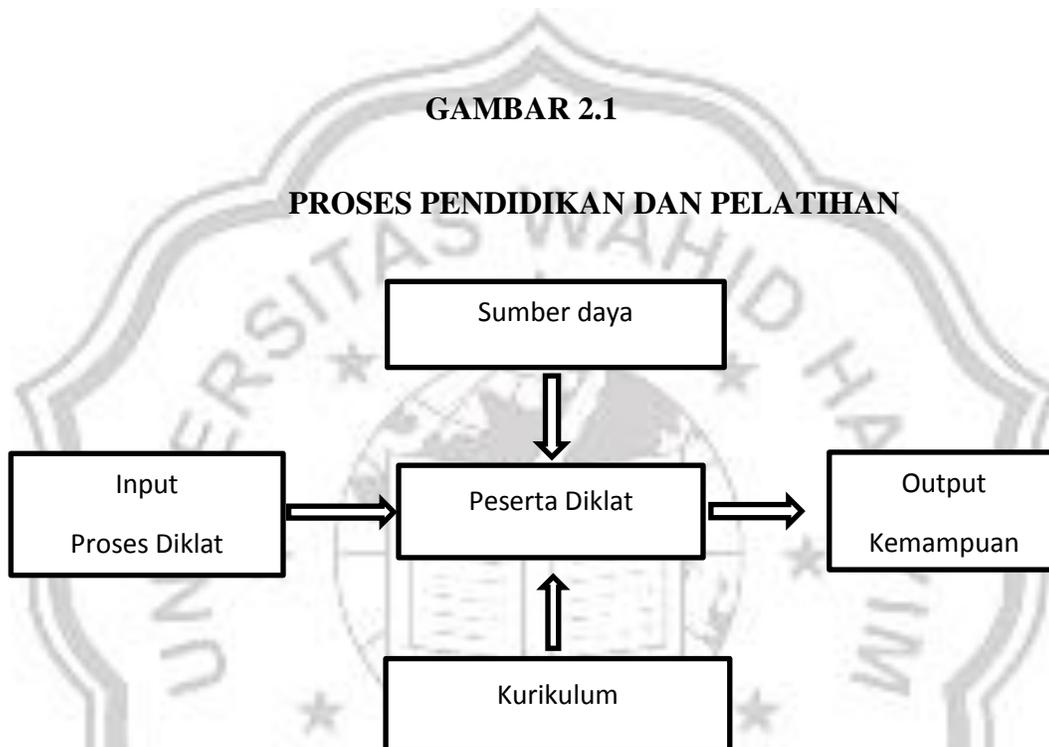
memberikan bantuan bagi karyawan atau pekerja untuk menguasai keterampilan khusus atau membantu untuk memperbaiki kekurangan dalam melaksanakan pekerjaan mereka.

Perbedaan yang nyata dengan pendidikan, diketahui bahwa pendidikan pada umumnya bersifat filosofis, teoritis, bersifat umum, dan memiliki rentangan waktu belajar yang relatif lama dibandingkan dengan suatu pelatihan. Sedangkan yang dimaksudkan dengan pembelajaran, mengandung makna adanya suatu proses belajar dan sumber belajar yang tersedia. Dalam arti pembelajaran merupakan kondisi seseorang atau kelompok yang melakukan proses belajar.

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud pelatihan dalam hal ini adalah proses pendidikan yang didalamnya ada proses pembelajaran dilaksanakan dalam jangka pendek, bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan, sehingga mampu meningkatkan kompetensi individu untuk menghadapi pekerjaan didalam organisasi sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Dengan demikian dapat saya simpulkan bahwa “pelatihan sebagai suatu kegiatan meningkatkan kinerja saat ini dan kinerja mendatang”.

Apabila dilihat dari pendekatan sistem, maka proses pendidikan dan pelatihan terdiri dari input (sasaran diklat), dan out put (perubahan perilaku)

dan faktor yang mempengaruhi proses diklat terdiri *hardware* dan *software* (Notoadmodjo, 1998). Skema proses pendidikan dan pelatihan dapat dilihat pada gambar 1.2.



Dengan pelatihan diharapkan karyawan bisa mengembangkan diri mereka untuk dapat bekerja secara lebih efektif dan efisien. Pelatihan dimaksudkan juga untuk menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan baru atau sikap, tingkah laku, keterampilan, dan pengetahuan, sesuai dengan tuntutan perubahan.

Pada dasarnya pendidikan dan latihan diadakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan operasi perusahaan dan dapat menunjang karier atau non karier dari karyawan yang .Pendidikan dan pelatihan disebut bersifat karier

jikabertujuan mempersiapkan karyawan yang bersangkutan untuk tugas-tugas yang akan datang. Pendidikan dan latihan tersebut harus disesuaikan dengan pengembangan perencanaan karier dan untuk kepentingan organisasi secara keseluruhan maupun individu karyawan, pendidikan, dan pelatihan merupakan prakondisi yang disyaratkan sehingga perlu dipersiapkan dan direncanakan program pendidikan dan latihan yang terpadu.

1. Pendidikan dan latihan disebut nonkarier jika bertujuan meningkatkan kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugasnya sekarang maupun dimasa mendatang.

#### **2.1.6 Masa Kerja**

Setiap orang memiliki pengalaman yang luas akan lebih mudah berinteraksi dalam melaksanakan pekerjaannya baik diorganisasi, perusahaan, maupun juga dipemerintahan. Dengan demikian orang yang berpengalaman mempunyai peluang yang lebih besar untuk mengerjakan tugas-tugas perusahaan dengan baik dibandingkan dengan orang yang belum berpengalaman. Pengalaman adalah proses pembentukan pengetahuan atau keterampilan tentang metode suatu pekerjaan karena keterlihatan karyawan tersebut dalam pelaksanaa tugas pekerjaan. Pengalaman kerja adalah ukuran tentang lama waktu atau masa kerja yang telah ditempuh seseorang dapat memahami tugas-tugas pekerjaan dan telah melaksanakan dengan baik.

Pengalaman dan pendidikan sering digunakan secara bersamaan, karena kombinasi antara pengalaman dan pendidikan dapat menciptakan kemampuan tersendiri dalam melaksanakan tugas-tugas perusahaan. Orang yang berpengalaman telah mempraktekan teori yang pernah diperoleh dari belajar atau pendidikan. Dengan demikian perpaduan antara pengalaman dan pendidikan akan lebih meningkatkan mutu pekerjaan atau tugas-tugas dalam aktivitasnya. “pengalaman kerja membuat seseorang dapat meningkatkan pengetahuan teknis maupun keterampilan kerja dengan mengamati orang lain, menirukan dan melakukan sendiri tugas-tugas pekerjaan yang ditekuninya. Dengan melakukan pekerjaan secara berulang-ulang, seseorang akan lebih mahir melaksanakan tugasnya dan membuka peluang untuk memperoleh cara kerja yang lebih praktis, efisien, dan produktif. (Ambar Teguh : 2016).

Pengalaman kerja yang dimiliki staf bagian keuangan/akuntansi akan mempermudah dalam melakukan pekerjaan karena dengan pengalaman kerja profesional tersebut maka staf bagian keuangan/akuntansi lebih mengerti dan cekatan dalam menyusun laporan keuangan. Pengalaman kerja profesional dalam bidang akuntansi akan lebih memberikan kemudahan dan ketelitian dalam proses penyusunan laporan keuangan.

### **2.1.7 Jabatan**

Jabatan (occupation) ialah pekerjaan yang telah melembaga dalam suatu instansi, perusahaan atau telah membudaya dalam masyarakat. Jabatan juga

mencakup tanggung jawab (responsibility) ialah hal yang menjadi keharusan pemegang jabatan sedangkan wewenang (authority) ialah hak pemegang jabatan untuk menerima, menuntut kepatuhan, mengajukan pendapat, pengambilan keputusan, akhir dan memerintahkan pelaksanaannya mengenai suatu hal tertentu (Tulus, 1996 dalam Eriva, 2015).

## **2.2 Hubungan Logis Antar Variabel dan perumusan hepotesis**

### **2.2.1. Hubungan Tingkat Pendidikan dan Pemahaman Laporan keuangan Daerah**

Menurut Nazier (dalam ervina, 2015 ) bmenyatakan bahwa sangat penting untuk menempatkan SDM yang potensial dan bertanggungjawab, serta menempatkan SDM dengan kompetensi yang memadai baik secara teknis maupun administrasi dalam bidang pengelolaan keuangan daerah. Menghadapi berbagai kualitas laporan keuangan, tanpa akuntan yang handal sangat dibutuhkan pada sektor publik baik sebagai penentu kebijakan. Sayangnya hasil penelitian BPK menunjukkan adanya masalah SDM pemerintah Pusat dan Daerah. Hasil kuesioner oleh BPK menunjukkan bahwa mayoritas yaitu 76,77% unit pengelola keuangan Negara diisi oleh pegawai yang tidak memiliki latar belakang akuntansi.

Hasil penelitian (Arfan dan Faisal, 2014) menunjukkan adanya pengaruh pendidikan terhadap tingkat pemahaman aparatur pemerintah tentang prinsip-prinsip *good governance*. Hal ini bermakna bahwa jika pendidikan aparatur pemerintah terhadap prinsip-prinsip *good governance* akan meningkat pula. Hasil

serupa didapat pada penelitian Almaidar (2015) yang mengungkapkan bahwa proses penyusunan laporan keuangan menjadi terhambat karena kurangnya pemahaman aparatur yang terlibat dalam pengelolaan dan penatausahaan keuangan terhadap proses penyusunan laporan keuangan.

Dari pendapat di atas bisa diartikan bahwa tingkat pendidikan sangat berpengaruh terhadap pemahaman laporan keuangan daerah. Semakin tinggi pendidikan yang dimiliki semakin tinggi juga tingkat pengetahuannya sehingga pemahaman dalam menyusun laporan keuangan daerah juga akan semakin meningkat. Dihipotesiskan sebagai berikut :

**H<sub>1</sub> : Tingkat pendidikan mempunyai pengaruh terhadap Pemahaman Laporan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah**

#### 2.2.2. Hubungan Pelatihan dengan Pemahaman Laporan Keuangan Daerah

Pelatihan merupakan salah satu upaya dari manajemen perusahaan untuk meningkatkan kapasitas dari SDM yang dimilikinya agar mampu melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jenis pekerjaan yang dibebankan kepada para pegawai tersebut (Simamora, 2016). Pemahaman tentang jenis pekerjaan yang membutuhkan keterampilan dan pengetahuan khusus pada dasarnya membutuhkan adanya pelatihan agar para pegawai mampu menguasai dan melaksanakan jenis-jenis pekerjaan khusus tersebut dengan baik.

Penelitian (Nasarudin, 2016) menunjukkan bahwa pelatihan berdampak kepada informasi yang dihasilkan oleh SDM akuntansi yaitu menunjukkan informasi akuntansi yang berkualitas sejalan dengan tujuan perusahaan.

Dari pendapat diatas dapat diartikan bahwa pelatihan berpengaruh terhadap pemahaman laporan keuangan daerah. Karena pelatihan merupakan kegiatan melatih dan meningkatkan pemahaman seseorang. Jadi semakin banyak pelatihan yang diakui akan semakin tinggi pula tingkat pemahamannya. Oleh karena itu dalam penelitian ini disusun hipotesis sebagai berikut :

**H<sub>2</sub> : Pelatihan mempunyai pengaruh terhadap pemahaman Laporan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah.**

### 2.2.3. Hubungan Masa Kerja dengan Pemahaman Laporan Keuangan Daerah

(Nitisetyo, 1996) menyatakan bahwa masa kerja merupakan hasil penyarapan dari berbagai aktivitas manusia, sehingga mampu menumbuhkan ketrampilan yang muncul secara otomatis dalam tindakan yang dilakukan karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan. Masa kerja seseorang berkaitan dengan pengalaman kerjanya.

(Purnamasari, 2005) menyimpulkan bahwa seorang karyawan yang memiliki pengalaman kerja yang tinggi akan memiliki keunggulan dalam berbagai hal diantaranya; 1). Mendeteksi kesalahan 2). Memahami kesalahan 3). Mencari penyebab timbulnya kesalahan.

Hasil penelitian (Almaidar, 2015) dipemkab pidie bahwa masa kerja jabatan PA dan PPK masih rendah dimana dipemkab pidie terjadi turnover posisi pejabat cukup tinggi dimana jumlah pejabat (PA dan PPK) yang mempunyai masa kerja dibawah 1 tahun sebanyak 27 orang dari total 47 orang pejabat (58% pejabat). Keadaan tersebut yang menjadi salah satu penyebab kurangnya pemahaman pejabat terutama PPK terhadap proses penyusunan laporan keuangan.

Dari hasil penelitian tersebut diatas membuktikan bahwa masa kerja berpengaruh terhadap tingkat pemahaman aparatur tentang laporan keuangan daerah. Semakin lama seseorang dalam menekuni bidang pekerjaannya maka semakin tinggi pula tingkat pemahamannya. Dihipotesiskan sebagai berikut:

**H<sub>3</sub> : Masa kerja mempunyai pengaruh terhadap pemahaman laporan keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah.**

#### 2.2.4. hubungan jabatan dengan pemahaman laporan keuangan daerah

Jabatan (occupation) ialah pekerjaan yang telah melembaga dalam suatu instansi. Perumahan atau telah membudaya dalam masyarakat. Kompetensi jabatan SDM aparatur (PNS) adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seseorang PNS berupa pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku, yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya (Mustopadidjaja,2002) dalam Eriva (2015). Dengan adanya kompetensi akan menciptakan aparatur yang

memiliki semangat untuk selalu bertindak efisien, rasional, transparan, akuntabel, dan profesional.

Hasil penelitian Almaidar di Pemkab pidie (2015) diperoleh data dari 23 SKPD hanya 7 SKPD yang mampu menyelesaikan laporan keuangan dikarenakan mereka masih belum mengerti dalam proses penyusunan laporan keuangan, dimana pada akhir penelitian juga disimpulkan bahwa ketidakmampuan penyelesaian laporan keuangan lebih dikarenakan kompetensi jabatan yang tidak sesuai dengan jenis pekerjaan.

Berdasarkan pendapat di atas dapat diartikan bahwa jabatan sangat berpengaruh terhadap pemahaman aparatur dalam menyusun laporan keuangan daerah. Dengan hipotesis sebagai berikut :

**H<sub>4</sub> : Jabatan mempunyai pengaruh terhadap Pemahaman Laporan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah.**

### **2.3 Penelitian Terdahulu**

Review penelitian terdahulu berupa nama penelitian dan tahun, sampel, variabel dan metode analisis serta hasil ditunjukkan pada tabel berikut :

#### **TABEL**

#### **Review Penelitian Terdahulu**

| No | Peneliti dan Tahun          | Sampel   | Variabel dan Metode Analisis  | Hasil   |
|----|-----------------------------|--|---|---|
| 1  | Eriva dan Islahuddin (2015) | Pejabat Pengguna Anggaran (SKPA) dan PPK dari badan, dinas kantor dipemerintah Aceh jumlah respondeng 84 orang | -Independen Tingkat Pendidikan, pelatihan, masa kerja dan jabatan<br>-Dependen pemahaman laporan keuangan daerah Metode analisis yang digunakan adalah regresi logistik | Pelatihan berpengaruh terhadap pemahaman laporan keuangan daerah sedangkan tingkat pendidikan, masa kerja dan jabatan tidak mempunyai pengaruh terhadap pemahaman laporan keuangan daerah |
| 2  | Almaidar (2015)             | Pejabat Pengguna Anggaran (PA) dan PPK dari badan dinas di Kabupaten   | -Independen latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, fasilitas teknologi,   | Rata-rata tingkat pemahaman aparatur dilingkup SKPD terhadap proses penyusun laporan keuangan secara  |

|   |                         |   |  |   |
|---|-------------------------|---|--|---|
|   |                         | Bantul  | <p>dan pelatihan</p> <p>-Dependen Tingkat pemahaman aparatur pemerintah daerah terhadap SAP Analisis yang digunakan adalah regresi ganda</p>                 | <p>keseliuruhan masih rendah</p>  |
| 3 | Arfan dan Faisal (2014) | <p>Pejabat golongan eselon 11 dan eslon 1V yang bekerja dipemerintah kota banda Aceh jumlah responden 459 aparatur pemerintah</p> | <p>-Independen masa kerja, jabatan dan pendidikan</p> <p>-Dependen Pemahaman laporan keuangan daerah modal analisis yang digunakan adalah Regresi linier</p> | <p>Masa kerja, pendidikan berpengaruh terhadap pemahaman aparatur pemerintah tentang prinsip-prinsip <i>good governance</i> di pemerintahan Kota banda Aceh</p> |

|   |                    |  |   |  |
|---|--------------------|--|---|--|
|   |                    | dalam 27 dinas   | ganda   |  |
| 4 | Dwi Cahyadi (2014) | Tim anggaran eksekutif dan panitia anggaran legislatif jumlah responden 46 orang | -Independen<br>Tingkat pendidikan, masa kerja, pelatihan dan posisi di pemerintah<br>-Dependen<br>Pemahaman laporan keuangan daerah model analisis yang digunakan adalah Regresi linier ganda | Tingkat pendidikan, masa kerja, pelatihan dan posisi di pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemahaman laporan keuangan daerah |
| 5 | Aidil (2016)       | 32 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan pejabat pengelola                    | -Independen<br>peraturan, latar belakang pendidikan, pelatihan dan  | Secara simultan peraturan, latar belakang pendidikan, pelatihan dan komitmen serta   |

|  |  |                        |  |   |
|--|--|------------------------|--|---|
|  |  | keuangan daerah (PPKD) | komitmen serta perangkat pendukung -Dependen Kemampuan satuan perangkat daerah terhadap dalam menyusun laporan keuangan daerah | perangkat pendukung berpengaruh terhadap kemampuan satuan kerja perangkat daerah dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah secara parsial perangkat pendukung berpengaruh terhadap kemampuan satuan kerja perangkat daerah dalam menyusun laporan keuangan daerah |
|--|--|------------------------|--|---|

**2.4. Kerangka Pemikiran Teoritis**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh hubungan antara variabel terikat yaitu pemahaman laporan keuangan daerah dengan variabel bebas yaitu tingkat pendidikan, pelatihan, masa kerja dan jabatan yang menunjukkan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Kerangka konseptual penelitian ini digambarkan pada model berikut ini :

GAMBAR 2.2

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS

